



Berharap Realisasi Dana Kelurahan

■ Bisa Mempercepat Progres Pembangunan Lokal

Misalkan semula dengan APBD (pembangunan) bisa selesai 5 tahun, dengan dana kelurahan, (diharapkan) 2 tahun sudah selesai.

Heroe Poerwadi
Wakil Wali Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN Rencana pemerintah pusat menggelontorkan dana kelurahan untuk seluruh kota di Indonesia disambut baik oleh pemerintah kota (pemkot), tak terkecuali Pemkot Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hero Poerwadi menjelaskan, dana tersebut bisa mempercepat pembangunan di kelurahan, mengingat selama ini juga sudah ada anggaran untuk kelurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

● ke halaman 15

DANA UNTUK KELURAHAN

■ Pembahasan dana kelurahan yang dialokasikan dari APBN 2019 masih menimbulkan polemik.

- Jika terealisasi, dana ini dinilai sangat membantu pembangunan di kelurahan. Pasalnya, dana yang diterima kelurahan per tahun dari alokasi OPD dinilai cukup minim.
 - Di Kota Yogyakarta sendiri memiliki 45 kelurahan dari 14 kecamatan. Sebagai contoh, Kelurahan Gunungketur tahun 2018 menerima Rp150 juta, yang mayoritas digunakan untuk kegiatan nonfisik.
 - Pemkot Yogya menyatakan kesiapannya dalam mengelola dan mengawasi jika dana kelurahan terealisasi.
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

GRAFIS/FAZDA HARIZMAN

Berharap Realisasi Dana Kelurahan

● Sambungan Hal 9

"Sudah dialokasikan dari APBD kota dan provinsi. Dengan adanya tambahan dana, akan mempercepat capaian yang akan diperoleh (kelurahan). Misalkan semula dengan APBD (pembangunan) bisa selesai 5 tahun, dengan dana kelurahan, [diharapkan] 2 tahun sudah selesai," jelasnya, saat Pelatihan BKM, Lurah, dan Camat Program Kota-kota, Ruang Bima Balaikota, Selasa (23/10).

Meski demikian, Heroe mengutarakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dasar yang digunakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan total dana kelurahan yang rencananya dialokasikan Rp3 triliun dari APBN 2019 ke masing-masing kota di Indonesia. "Uang Rp3 triliun apakah dibagi seIndonesia sama rata atau sesuai jumlah penduduk atau luas wilayahnya, ini yang kami belum tahu," ucapnya.

Heroe mengimbau bahwa pihaknya juga belum mengetahui terkait kewenangan pengelolaan dana kelurahan tersebut nantinya. Apakah otonom atau akan ditentukan pengelolaan untuk bidang tertentu.

"Kalau kami berharap dana kelurahan bisa digunakan sesuai dengan RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan) yang dibuat Lurah, LPMK, BKM, RT, RW, dan tokoh masyarakat, yang tahu mau dijadikan apa kelurahan ini," tuturnya.

Ia menjelaskan, mulai tahun ini Pemkot Yogya sudah mengharuskan setiap kelurahan punya rencana anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Setiap kelurahan punya rencana dan diturunkan.

"Kita ingin setiap kelurahan fokus terhadap apa yang akan dicapai. Ini akan mengurangi pembangunan

yang tidak ada daya lentingnya serta anggaran besar tapi tidak ada fokusnya sehingga dibagi rata. Makanya karena pemkot punya rencana ini, kalau betul ada dana kelurahan bisa jadi bagian rencana pembangunan," bebernya.

Disinggung mengenai kesiapan dan kemampuan tiap kelurahan dalam mengelola anggaran dari APBD selama ini, Heroe menjelaskan bahwa mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. "Saya optimis Kota Yogya siap menerima dana kelurahan. Kalau di kota ada sanksi. Kalau digelontorkan tahun ini, dan akhir tahun tidak ada laporan maka tahun depan tidak bisa mencairkan. Misal LPMK kami kasih Rp90 juta, tidak ada laporan, maka tahun depan tidak cair," tandasnya.

Penyerapan anggaran

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edy Muhammad menjelaskan terkait capaian penyerapan anggaran, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan sudah dinilai bagus.

"Sesuai dengan tahapan yang disusun karena anggaran di kelurahan adalah dari OPD (organisasi perangkat daerah) yang pengguna anggarannya di kecamatan. Sejauh ini menunjukkan capaian sesuai jadwal, deviasi tidak besar," ucapnya.

Edy belum bisa berbicara banyak terkait pengawasan dana kelurahan nantinya. Ia menuturkan akan mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk pengawasan dana tersebut. "Tapi karena belum ada kejelasan aturan lainnya, kami kawal. Keselapan kelurahannya sudah serap, sudah serapnya sudah serapnya RPJMK. Kalau dana kelurahan turun, kita distribusikan. Cuma apakah ditononkan penuh atau tertentu, itu tunggu aturan dari pusat," bebernya.

Pemerintah sedang merancang dana kelurahan dalam RAPBN 2019 yang kini masih dibahas antara

Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI. Dana kelurahan ini juga telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang didasari dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah.

Lantas, apa itu dana kelurahan dan apa bedanya dengan dana desa yang selama ini sudah diterapkan? Merujuk laman Sekretariat Negara di setkab.go.id, dana kelurahan merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kelurahan dengan besaran yang berbeda dengan dana desa.

"Besaran jumlah alokasi anggaran tentu berbeda dengan jumlah dana desa, luas wilayah kelurahan kecil, walaupun mungkin kalau jumlah penduduk lebih banyak dari desa, tapi kan berbeda masalahnya, infrastruktur di desa lebih kompleks dan luas," demikian keterangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tertera dalam laman Sekretariat Negara, Sabtu (21/10).

Pada prinsipnya, dana kelurahan sama dengan dana desa, yakni untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Namun, alasan mendasar membuat program dana kelurahan adalah karena banyak keluhan dari masyarakat terkait operasional untuk tingkat kelurahan.

Dana kelurahan ini nantinya akan diberikan kepada tiap kelurahan yang ada di kota. Selain itu, Jokowi juga menjanjikan untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur operasional dana desa guna mengarahkan penggunaan dan fungsi dana desa agar tepat sasaran dan digunakan secara efektif.

"Sebelum lagi akan kami revisi PP (Peraturan Pemerintah)-nya, baru kami hitung-hitung, belum tahu dapat 5 atau 4 persen, nanti akan kami putuskan," sebut Jokowi, dikutip dari Kompas.com. [kur/kpc]

Gunungketur Siap Mengelola

LURAH Gunungketur, Murwanto menjelaskan, anggaran dari APBD ke kelurahannya untuk tahun 2018 ini sekitar Rp150 juta. Anggaran tersebut bersumber dari OPD yang diberikan

ke kecamatan, yakni Kecamatan Pakualaman dan didistribusikan ke kelurahan melalui sistem paket.

● ke halaman 15

Gunungketur Siap Mengelola

● Sambungan Hal 9

"Besaran APBD ke kelurahan sekitar Rp150 juta itu habis semua. Digunakan untuk pelatihan, sosialisasi, workshop, dan FGD (*forum group discussion*). Kegiatannya untuk pemberdayaan yang lebih banyak nonfisik. Kalau fisik diserahkan BKM tapi itu pun menggunakan anggaran dari pusat. Ada pembangunan fisik tapi sifatnya kecil misalkan renovasi balai RW," jelasnya, Selasa (23/10).

Ia menjelaskan, bila nantinya ada dana kelurahan akan sangat membantu pembangunan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan Kelurahan Gunungketur sedang geliat melakukan pembangunan kesejahteraan dan kesehatan melalui Kelurahan Siaga. Dana kelurahan tersebut

nantinya, bila bisa dikelola secara mandiri maka akan difokuskan untuk mengembangkan Kelurahan Siaga.

"Kami merupakan kelurahan siaga, mumi dikelola warga. Sudah ada iuran. Kalau ada warga non-PBI dan BPJS, sudah ada dana untuk membantu berobat mereka. Ada dokter juga di wilayah kami yang juga membantu, minimal bantuan obat-obatan. Lalu warga juga ada yang bertugas memotret masing-masing riwayat penyakit individu untuk mempermudah penanganannya," urai Purwanto.

Mengampu warga sekitar 4.000 jiwa dengan 1.200 kepala keluarga, Murwanto mengatakan pihaknya siap mengelola dana kelurahan dengan baik. Pasalnya sumber daya manusia yang ada di kelurahan, diakuinya rata-rata telah memiliki latar belakang pendidikan hingga tingkat sarjana, sehingga dianggap mumpuni untuk pengelolaannya.

Inventarisasi masalah

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicksono menjelaskan, hal terpenting yang harus dilakukan pihak kelurahan adalah melakukan inventarisasi persoalan yang ada di kelurahan masing-masing. "Misalkan terkait masalah genangan air dan saluran air yang bisa mengakibatkan banjir, bisa dirinci mulai sekarang, serta permasalahan lainnya," ucapnya.

Terkait pengawasan, Sigit menilai nantinya akan lebih mudah mengawasi dana kelurahan. Pasalnya, lingkup kota yang memiliki luas wilayah yang tidak seberapa bila dibanding desa dengan dana desanya.

"Persoalan lain adalah bagaimana nantinya memastikan bahwa dana kelurahan bisa digunakan untuk kegiatan yang benar-benar ada manfaatnya. Itu yang perlu menjadi catatan penting," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005